BAGIAN PERENCANAAN
BIRO PKU

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Perencanaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Bagian Perencanaan sebagai bagian dari Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bagian Perencanaan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bagian Perencanaan di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 24 Januari 2020
Kepala Bagian Perencanaan

Dessy Fitrica Sylviani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Bagian Perencanaan.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bagian Perencanaan tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
1. Terselenggaranya penyusunan rencana program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel	1. Jumlah draft Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2. Jumlah draft Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3. Jumlah draft reviu Renstra/ IKU	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Rata-rata capaian Sasaran 1			**100%**
2. Terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan akuntabel	4. Jumlah draft RKAKL	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	5. Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4 Dokumen	6 Dokumen	67%
	6. Jumlah draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DRP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Rata-rata capaian Sasaran 2			**89%**
3. Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel	7. Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	100%
	8. Jumlah draft Laporan Tahunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	9. Jumlah draft Laporan Monev	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Rata-rata capaian Sasaran 3			**100%**
Rata-rata capaian Tahun 2019				**96%**

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja di Bagian Perencanaan tahun 2019 tidak semua target tercapai 100%. Untuk itu, perlu untuk terus melakukan perbaikan antara lain :

1. Pengembangan aplikasi e-performance, yaitu aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan pelaporan sesuai kebutuhan dan mudah digunakan.
2. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan semua unit kerja agar bersinergi dalam penyusunan rencana kerja, penganggaran, monitoring dan pelaporan kegiatan.

DAFTAR ISI

Halaman Cover 1
Kata Pengantar 2
Ringkasan Eksekutif 3
Daftar Isi 5

BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang 6
I.2 Maksud dan Tujuan 6
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
I.4 Sumber Daya Manusia 8
I.5 Peran Strategis 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis 10
II.1.1 Visi dan Misi 10
II.1.2 Tujuan dan Sasaran 10
II.2 Perjanjian Kinerja 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja 14
III.2 Realisasi Anggaran 32
BAB IV PENUTUP
Penutup 33

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi Bagian Perencanaan, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang.

Kinerja Bagian Perencanaan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada Tahun 2019 Badan Standardisasi Nasional telah melakukan reorganisasi yang dituangkan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Sesuai Peraturan tersebut, untuk membantu tugas Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, tugas Bagian Perencanaan adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran; dan
3. Penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Struktur Bagian Perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut.

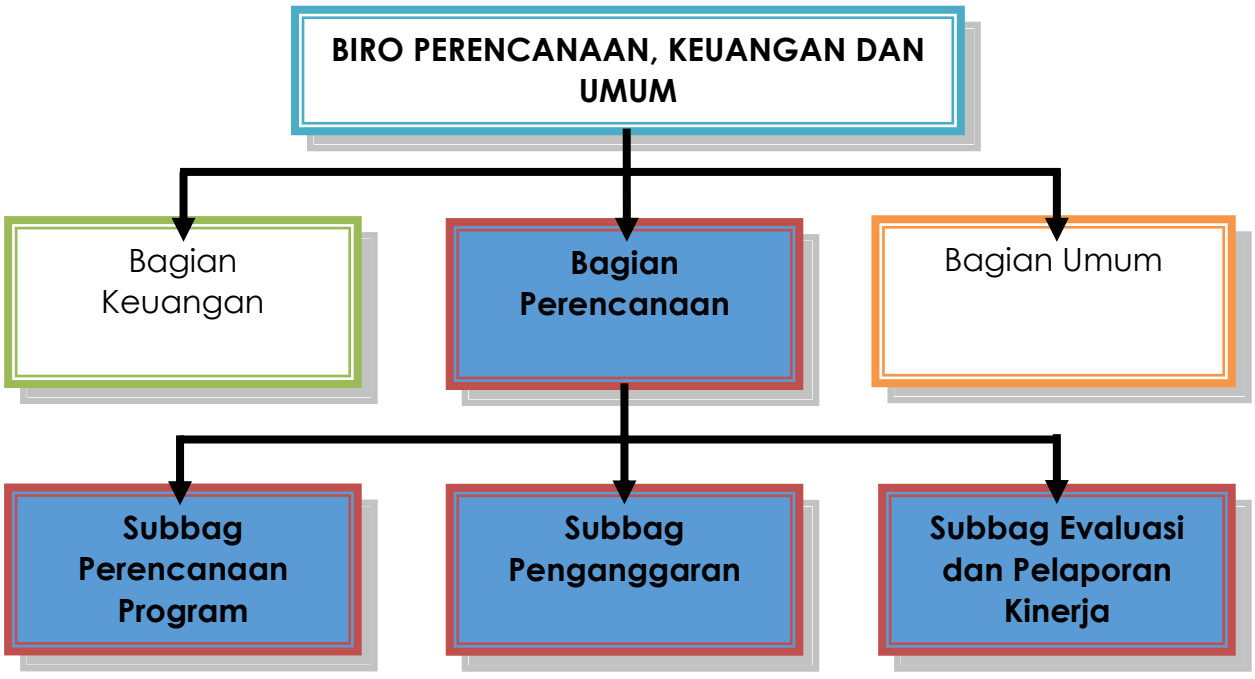

Gambar I.1
Struktur Organisasi Bagian Perencanaan

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Perencanaan mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. **Subbagian Perencanaan Program**, dengan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan
2. **Subbagian Penganggaran**, dengan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan
3. **Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja**, dengan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Bagian Perencanaan memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Bagian Perencanaan

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	**Bagian Perencanaan**	**-**	**1**	**-**	**1**
2.	**Subbagian Perencanaan Program**	**-**	**5**	**1**	**6**
	- Kepala Subbagian			1	1
	- JFK Perencana Pertama		3		3
	- Analis Perencanaan		1		1
	- Analis Perencanaan		1		1
3.	**Subbagian Penganggaran**	**-**	**4**	**-**	**4**
	- Kepala Subbagian		1		1
	- JFK Perencana Muda		1		1
	- JFK Perencana Pertama		1		1
	- Analis Penganggaran		1		1
	- Pengadministrasi Perencanaan & Program				-
4.	**Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja**	**-**	**2**	**1**	**3**
	- Kepala Subbagian		-	1	1
	- JFK Perencana Pertama		1		1
	- Analis Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan		1		1
	Jumlah	**-**	**12**	**2**	**14**

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bagian Perencanaan sebagai bagian dari Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu dengan menjalankan peran perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan kinerja. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Perencanaan telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bagian Perencanaan

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja yang sudah mendapatkan nilai baik (B) dari KemenPANRB	▪ Anggaran kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) masih terbatas ▪ Kinerja BSN masih belum optimal dan belum terukur pencapaiannya dengan tepat	▪ Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan program antar K/L ▪ Pengusulan penambahan anggaran melalui program yang mendukung Prioritas Nasional ▪ Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel

MISI

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan dan ketatausahaan dan rumah tangga
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Rumusan tujuan ini telah dilakukan penyempurnaan dari tujuan yang sebelumnya tertuang dalam Renstra Biro PKU 2015-2019.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, dalam rangka perbaikan berkelanjutan, sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum telah dilakukan penyempurnaan dari yang tertuang dalam Renstra Biro PKU 2015-2019.

Berikut sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

1. Meningkatnya kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional
2. Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel
4. Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatusahaan yang sistematis
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Perspektif Stakeholders		
1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber data manusia tata kelola dan organisasi yang profesional	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB) Nilai
	2. Opini BPK atas laporan keuangan BSN	WTP Opini
	3. Indeks kepuasan layanan internal Biro PKU	3,5 Nilai
Perspektif Proses Internal		
2. Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel	4. Persentase penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat	100%
	5. Persentase penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu	70%
	6. Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti	70%
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	7. Persentase kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%
	8. Persentase penyampaian laporan PNBP tepat waktu	100%
4. Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis	9. Persentase pemenuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN	100%
Perspektif Learning and Growth		
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	10. Persentase realisasi anggaran Biro PKU	≥97%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bagian Perencanaan Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel	1. Jumlah draft Renja	1 Dokumen
		2. Jumlah draft Perjanjian Kinerja	1 Dokumen
		3. Jumlah draft reviu Renstra/IKU	1 Dokumen
2	Terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan akuntabel	4. Jumlah draft RKAKL	2 Dokumen
		5. Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4 Dokumen
		6. Jumlah draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR	1 Dokumen
3	Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel	7. Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Laporan
		8. Jumlah draft Laporan Tahunan	1 Laporan
		9. Jumlah draft Laporan Monev	12 Laporan

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun rincian output output dan komponen yang dihasilkan oleh Bagian Perencanaan untuk melaksanakan kegiatan di Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah sebagai berikut:

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BSN, melalui kegiatan:

3550 Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum, yang akan menghasilkan output dan komponen yang terkait dengan Bagian Perencanaan, yaitu:

Output : **3550.952 Layanan Perencanaan**
Sub output : ***3550.952.001 Dokumen Perencanaan***
Komponen : 051. Penyusunan Rencana Kerja
052. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
053. Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi
055. Penyusunan Laporan Tahunan
Sub output : ***3550.952.002 Dokumen RKA-K/L***
Komponen : 051. Penyusunan RKA-K/L
Sub output : ***3550.952.003 Dokumen Laporan Kinerja***
Komponen : 051. Penyusunan Laporan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bagian Perencanaan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian Perencanaan yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
1. Terselenggaranya penyusunan rencana program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel	1. Jumlah draft Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2. Jumlah draft Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3. Jumlah draft reviu Renstra/IKU	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. Terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan akuntabel	4 Jumlah draft RKAKL	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	5 Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4 Dokumen	6 Dokumen	67%
	6 Jumlah draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3. Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel	7 Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	100%
	8 Jumlah draft Laporan Tahunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	9 Jumlah draft Laporan Monev	12 Laporan	12 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian Perencanaan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1 — **Terselenggaranya penyusunan rencana program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel**

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah draft Renja	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	5	100 %
2. Jumlah draft Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1	2	100%	5	100%
3. Jumlah draft reviu Renstra/IKU	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	5	100%
Rata-rata capaian Sasaran								**100%**		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terselenggaranya penyusunan rencana program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) jumlah draft Renja; (2) jumlah draft Perjanjian Kinerja; dan (3) jumlah draft reviu Renstra/IKU. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut seluruhnya tercapai 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah Draft Renja

Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai pejabaran dari Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2019, Bagian Perencanaan menyusun 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN Tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) BSN disusun secara komprehensif di Aplikasi Kolaborasi Informasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran (KRISNA). Hasil dari aplikasi tersebut menghasilkan 1 Dokumen Rencana Kerja BSN 2020 yang meliputi Rencana Kerja (Renja) BSN, Eselon I dan Eselon II serta dokumen hasil trilateral meeting. Setiap tahunnya BSN menghasilkan 1 dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN.

Sesuai dengan target yang diharapkan, Bagian Perencanaan berhasil menyusun 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN Tahun 2020.

Penyusunan 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN ini berhasil dilakukan 100% karena didukung oleh terlaksananya tahapan-tahapan penyusunan dokumen dengan baik dan lancar.

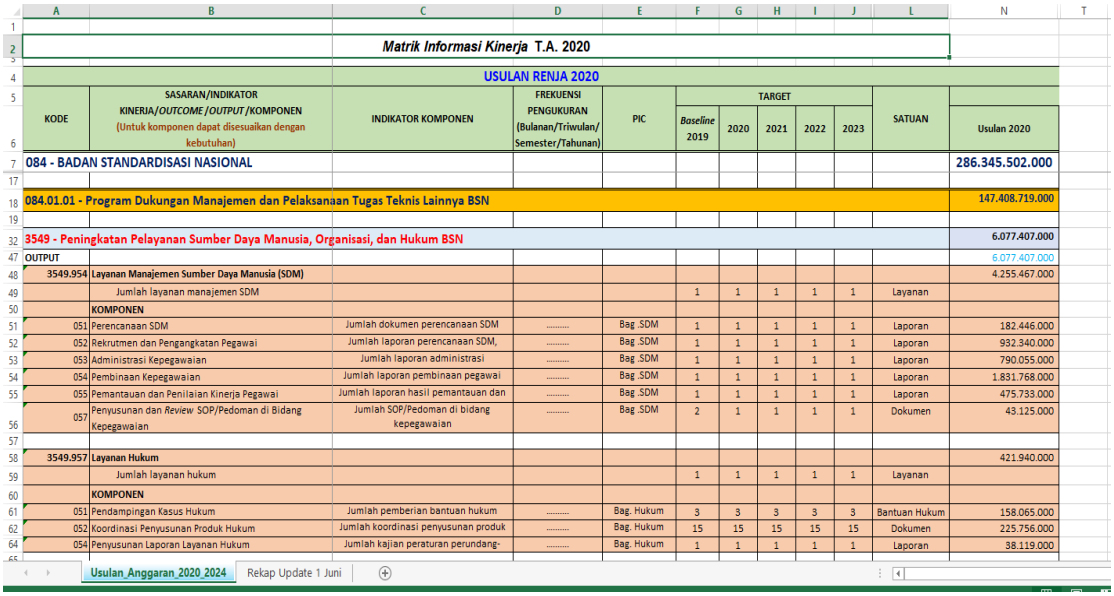

Matrik Informasi Kinerja T.A. 2020

USULAN RENJA 2020

KODE	SASARAN/INDIKATOR KINERJA/*OUTCOME*/*OUTPUT*/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KOMPONEN	FREKUENSI PENGUKURAN (Bulanan/Triwulan/ Semester/Tahunan)	PIC	TARGET					SATUAN	Usulan 2020
					Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		
084 - BADAN STANDARDISASI NASIONAL											286.345.502.000
084.01.01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN											147.408.719.000
3549 - Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum BSN											6.077.407.000
OUTPUT											6.077.407.000
3549.954	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)										4.255.467.000
	Jumlah layanan manajemen SDM				1	1	1	1	1	Layanan	
	KOMPONEN										
051	Perencanaan SDM	Jumlah dokumen perencanaan SDM	.....	Bag .SDM	1	1	1	1	1	Laporan	182.446.000
052	Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai	Jumlah laporan perencanaan SDM,	.....	Bag .SDM	1	1	1	1	1	Laporan	932.340.000
053	Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi	.....	Bag .SDM	1	1	1	1	1	Laporan	790.055.000
054	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah laporan pembinaan pegawai	.....	Bag .SDM	1	1	1	1	1	Laporan	1.831.768.000
055	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan hasil pemantauan dan	.....	Bag .SDM	1	1	1	1	1	Laporan	475.733.000
057	Penyusunan dan *Review* SOP/Pedoman di Bidang Kepegawaian	Jumlah SOP/Pedoman di bidang kepegawaian	.....	Bag .SDM	2	1	1	1	1	Dokumen	43.125.000
3549.957	Layanan Hukum										421.940.000
	Jumlah layanan hukum				1	1	1	1	1	Layanan	
	KOMPONEN										
051	Pendampingan Kasus Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum	.....	Bag. Hukum	3	3	3	3	3	Bantuan Hukum	158.065.000
052	Koordinasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah koordinasi penyusunan produk	.....	Bag. Hukum	15	15	15	15	15	Dokumen	225.756.000
054	Penyusunan Laporan Layanan Hukum	Jumlah kajian peraturan perundang-	.....	Bag. Hukum	1	1	1	1	1	Laporan	38.119.000

Usulan_Anggaran_2020_2024 | Rekap Update 1 Juni

Gambar III.1
Matriks Informasi Kinerja TA 2020

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN, Bagian Perencanaan menggunakan Aplikasi yaitu krisna.bappenas.go.id.

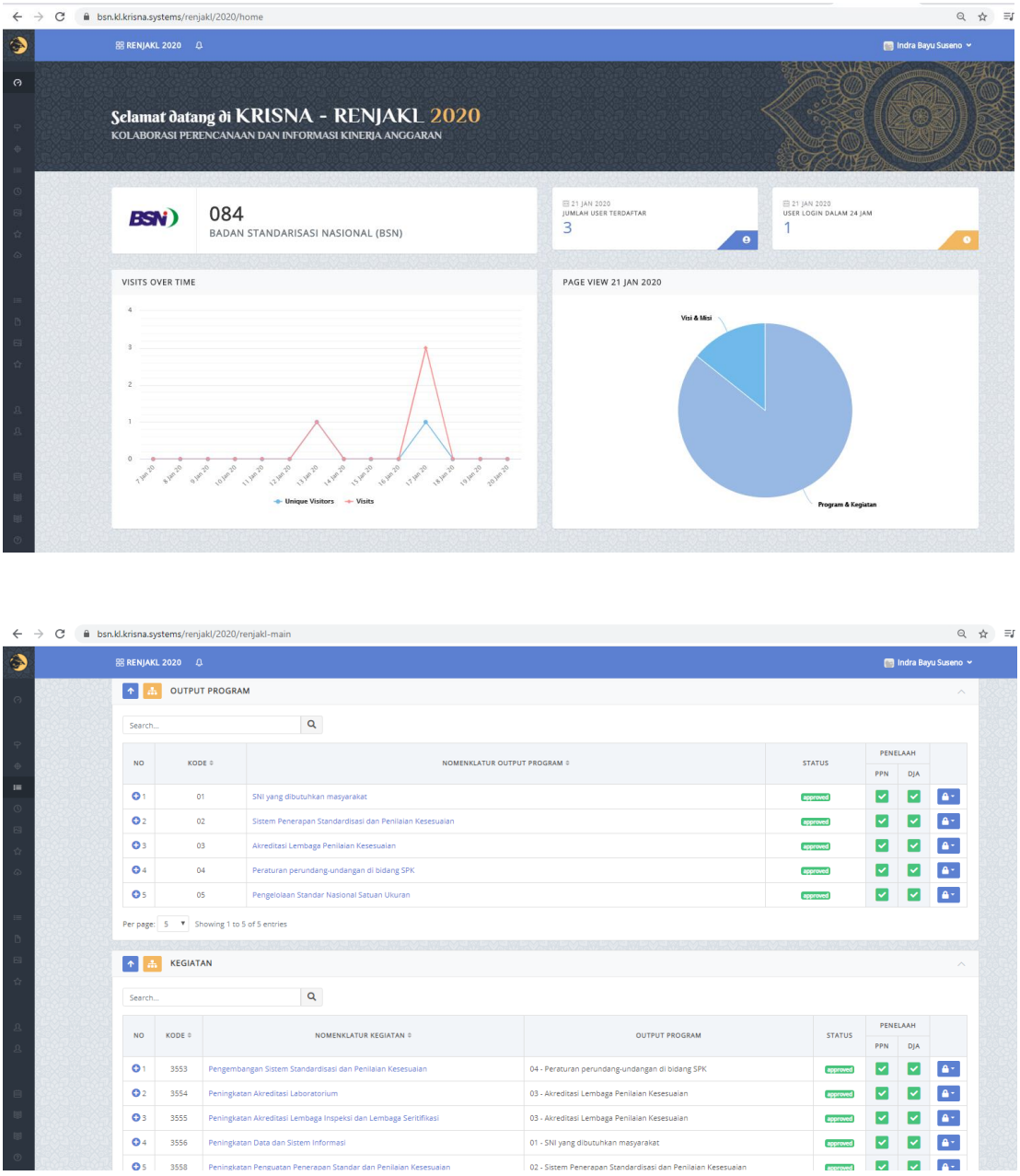

Gambar III.2
Aplikasi KRISNA

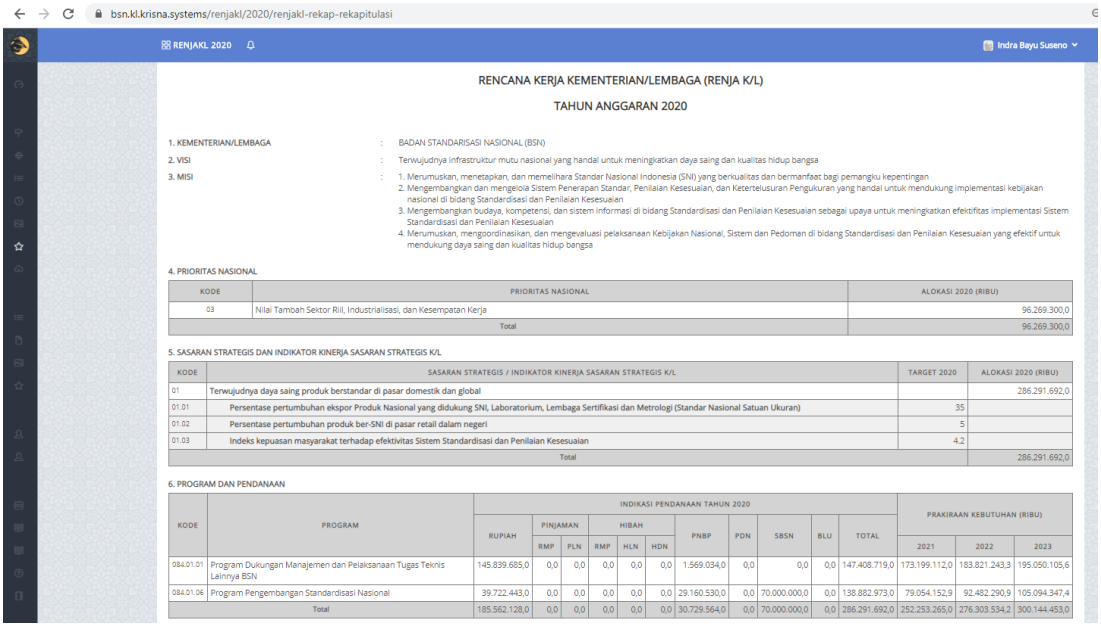

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

2. VISI : Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

3. MISI :
1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2020 (RIBU)
03	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	96.269.300,0
Total		96.269.300,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global		286.291.692,0
01.01	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	35	
01.02	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	5	
01.03	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,2	
Total			286.291.692,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020									PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2021	2022	2023
084.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	145.839.685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.569.034,0	0,0	0,0	0,0	147.408.719,0	173.199.112,0	183.821.243,3	195.050.105,6
084.01.06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	39.722.443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.160.530,0	0,0	70.000.000,0	0,0	138.882.973,0	79.054.152,9	92.482.290,9	105.094.347,4
Total		185.562.128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.729.564,0	0,0	70.000.000,0	0,0	286.291.692,0	252.253.265,0	276.303.534,2	300.144.453,0

Gambar III.3
Hasil Input Rencana Kerja (Renja) pada Aplikasi KRISNA

- Capaian Kinerja yang dicapai untuk jumlah draft Rencana Kerja (Renja) adalah 100%, dikarenakan realisasi sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 1 (satu) dokumen draft Renja.

Keberhasilan capaian 100% terhadap jumlah draft Rencana Kerja (Renja) ini dikarenakan oleh ketepatan waktu setiap unit kerja dalam mengirimkan usulan matriks kinerja unit kerja masing-masing untuk selanjutkan dapat digunakan oleh Bagian Perencanaan sebagai draft Renja BSN Tahun 2020 yang kemudian diinput ke Apllikasi KRISNA Bappenas.

2. Jumlah Draft Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2019 dilakukan 2 kali penandatanganan Perjanjian kinerja yaitu Perjanjian kinerja TA 2019 dan Perjanjian Kinerja TA 2020. Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kedeputian/Kesestamaan masing-masing dirumuskan secara berjenjang (cascading). Perjanjian Kinerja BSN terdiri dari Perjanjian Kinerja Lembaga, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Perjanjian Kinerja TA 2019 untuk Perjanjian Kinerja Lembaga, Eselon I dan Eselon II ditandatangani pada saat Rapat Kerja BSN tahun 2019 di Sentul. Jawa Barat, untuk Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV di BSN juga sudah mulai di susun mulai dari tahun 2017 yang ditandatangani di masing – masing unit kerja. Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2020 dilaksanakan pada Tanggal 16 Desember 2019 di Jakarta. Dokumen Penjanjian Kinerja tersebut dapat diakses pada website BSN sesuai petunjuk gambar III.6.

Gambar III.4
Penandatanganan Perjanjian Kinerja BSN TA 2019

Gambar III.5
Penandatanganan Perjanjian Kinerja BSN TA 2020

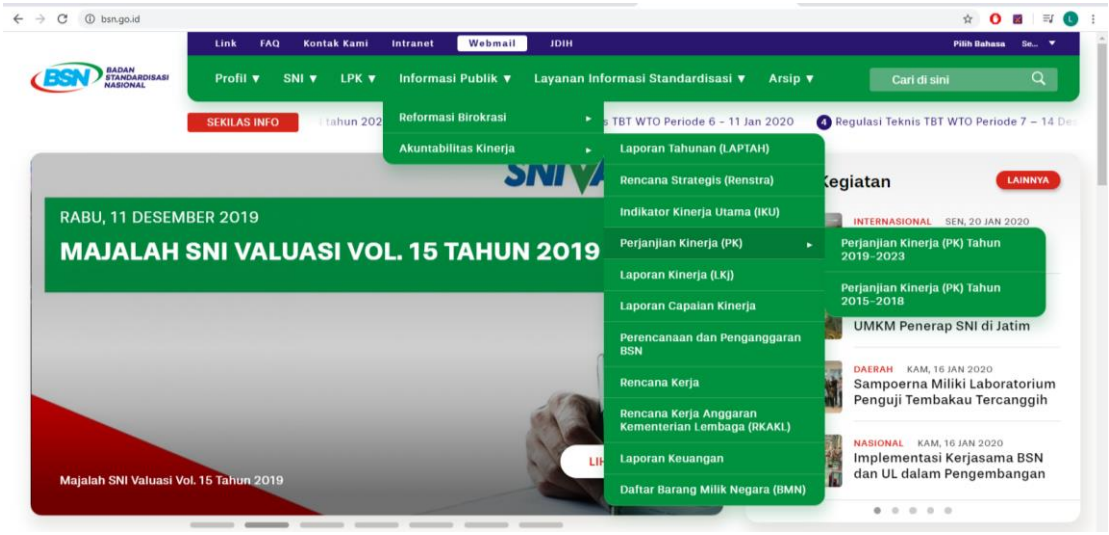

Gambar III.6
Akses dokumen Perjanjian Kinerja pada website BSN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Maret 2019
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Perspektif Stakeholders		
1 Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1 Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5 %
	2 Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1 %
	3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,40 Nilai
Perspektif Proses Internal		
2 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar	4 Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif)	12.703 SNI
	5 Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional	80 %
3 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	6 Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	100.000 sertifikat
	7 Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional	130 jenis layanan
4 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi	8 Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi	2.134 LPK
	9 Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional	12 Skema
5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	10 Persentase SNI yang diterapkan	10 %
	11 Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	70 %
Perspektif Learning & Growth		
6 Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	12 Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN	75,01 Nilai
	13 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB) Nilai
	14 Opini atas Laporan Keuangan BSN	WTP Opini
	15 Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN	70 %

Program	Anggaran (Rp.)
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	114.686.177.000
2 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	116.933.462.000
	231.619.639.000

Jakarta, 14 Maret 2019
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Gambar III.7
Perjanjian Kinerja Kepala BSN

3. Jumlah Draft Reviu Renstra/IKU

Reviu Renstra BSN termasuk reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan seluruh Ess I dan II dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Renstra/IKU dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Salah satu perubahan penting adanya penataan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, maka disusunlah revisi Renstra Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015–2019 untuk mengakomodir perubahan organisasi di lingkungan BSN. Perubahan tersebut menghasilkan 1 dokumen Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomer 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Selain itu, salah satu masukan penting untuk menyempurnakan Renstra/IKU ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN RB. Perubahan tersebut menghasilkan 1 dokumen Keputusan Kepala BSN No 201A/KEP/BSN/5/2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala BSN No.28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional.

Salinan

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama dalam rencana strategis Badan Standardisasi Nasional tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015

BSN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 1 -

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 201A/KEP/BSN/5/2019
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

Gambar III.8
Keputusan Kepala BSN tentang Penetapan IKU BSN

Gambar III.9
Dokumen Renstra BSN 2015-2019

SASARAN 2	**Terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan akuntabel**

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
4. Jumlah draft RKAKL	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	10	100%
5. Jumlah draft Revisi Anggaran Eksternal	Dokumen	5	6	6	6	4	6	67%	20	69%
6. Jumlah draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	5	100%
Rata-rata capaian Sasaran								**89%**		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (1) jumlah draft RKAKL; (2) jumlah draft revisi anggaran eksternal; dan (3) jumlah draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 89%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

4. Jumlah Draft RKAKL

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja K/L dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Di tahun 2019, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA BSN tahun 2020 dan penetapan DIPA BSN tahun 2020. Pagu Anggaran BSN tahun 2020 sebesar Rp. 286.291.692.000.

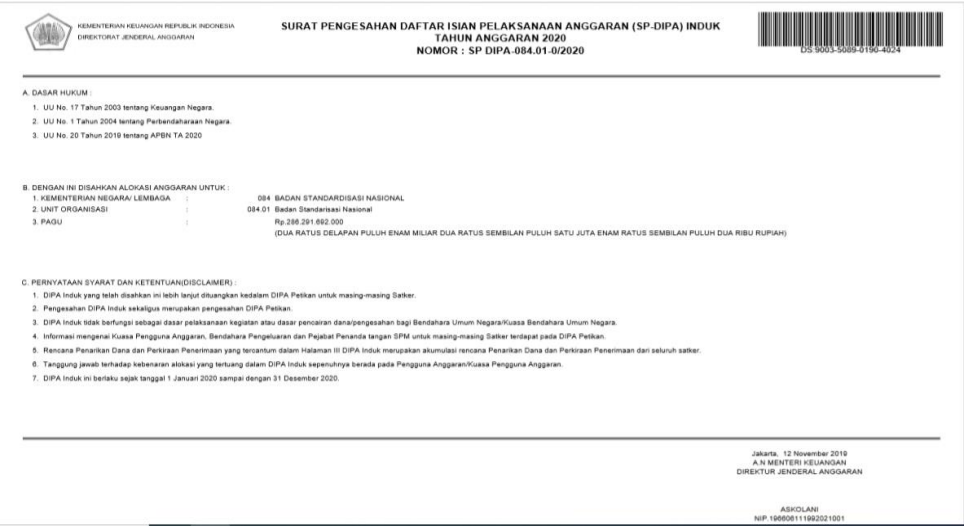

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA-084.01-0/2020

DS-9003-5089-0190-4024

A. DASAR HUKUM :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2. UNIT ORGANISASI : 084.01 Badan Standarisasi Nasional
3. PAGU : Rp.286.291.692.000
(DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI
NIP.196806111992021001

Gambar III.10
DIPA Induk BSN Tahun Anggaran 2020

Term of References (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Unit Kerja sebagai dasar penyusunan RKA sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Biro PKT dan di reviu oleh Inspektorat.

Mulai tahun 2019 seluruh K/L diminta untuk melakukan penataan nomenklatur kinerja dengan menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan aplikasi Satudja. Mengingat BSN masih terus melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan reorganisasi, maka pada tahun 2019 telah dilakukan kembali penataan nomenklatur kinerja BSN dalam rangka penyusunan RKA 2020.

5. Jumlah Draft Revisi Anggaran Eksternal

Revisi anggaran dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dalam mendukung program kerja BSN tahun 2019, revisi dapat dilakukan sesuai dengan kewenangannya, yaitu revisi internal dan revisi revisi ekternal. Revisi eksternal mencakup pergeseran ;

- Pergeseran antar program
- Persegeran antar kegiatan
- Pergeseran antar Ouput, antar subouantar komponen

Proses pengajuan revisi Eksternal ke Kementerian Keuangan sudah tidak perlu melalui Pusat layanan Kemenkeu lagi karena sudah ada aplikasi SatuDJA yang digunakan untuk proses tersebut.

Dalam implementasinya, pada TA 2019 terdapat 6 kali revisi RKAKL BSN TA 2019 yang ke Kementerian Keuangan. Revisi Anggaran tersebut melebihi target yang sudah ditentukan oleh Bagian Perencanaan sebanyak 4 kali. Adapun jenis revisi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Revisi Anggaran BSN TA 2019

Uraian	Anggaran	Tgl Pengesahan	Keterangan
DIPA Awal	Rp 231.619.639.000	05 Desember 2018	
DIPA Revisi 1	Rp 231.737.878.000	23 April 2019	Buka Blokir Pagu Anggaran TA.2019 dan Penyelesaian Luncuran Anggaran SBSN Lab.SNSU T.A.2018
DIPA Revisi 2	Rp 231.737.878.000	24 Mei 2019	Perubahan nomenklatur penganggaran baru karena reorganisasi BSN
DIPA Revisi 3	Rp 231.737.878.000	15 Agustus 2019	Optimalisasi Anggaran untuk Kegiatan SNI Award & Bulan Mutu Nasional 2019
DIPA Revisi 4	Rp 237.610.843.000	17 Oktober 2019	Topup Pagu Penggunaan PNBP BSN T.A.2019
DIPA Revisi 5	Rp 237.863.567.000	02 Desember 2019	Topup Pagu Penggunaan PNBP (Biro HKLI) BSN T.A.2019 & Optimalisasi Belanja pegawai T.A.2019
DIPA Revisi 6	Rp 245.736.441.000	18 Desember 2019	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai T.A.2019

- Revisi 1 disetujui tanggal 24 April 2019
  Revisi 1 merupakan revisi yang dilakukan BSN untuk Buka Blokir Pagu Anggaran TA 2019 sebesar Rp 1.398.090.000 pada ouput generik dan Penyelesaian Luncuran Anggaran SBSN Laboratorium SNSU TA 2018 kedalam Pagu Anggaran TA 2019 sebesar Rp. 118.239.000

- Revisi 2 disetujui tanggal 24 Mei 2019
  Revisi ke 2 dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur baru sehubungan dengan adanya reorganisasi BSN TA 2019. Revisi ini merubah yang sebelumnya 11 (sebelas) kegiatan menjadi 16 (enam belas) kegiatan.

- Revisi 3 disetujui tanggal 15 Agustus 2019
  Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan perioritas kegiatan BSN dalam mendukung kegiatan SNI Award & Bulan Mutu Nasional 2019 .

- Revisi 4 disetujui tanggal 17 Oktober 2019
  Revisi ini merupakan penambahan / *topup* Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BSN TA 2019 untuk seluruh Unit Layanan BSN. Revisi ini dikarenakan adanya kelebihan target penerimaan dari yang telah direncanakan, perubahan pagu anggaran PNBP, dan perubahan jenis belanja antar keluaran dalam satu kegiatan. Penerimaan PNBP untuk keseluruhan BSN sudah melebihi target, sehingga penggunaan pagu BSN sebesar 88,48 % dari penerimaan sehingga direvisi yang berakibat pada penambahan pagu BSN dari pagu sebesar Rp 230.837.878.000 menjadi Rp. 236.710.843.000. Secara keseluruhan, penambahan pagu tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan layanan yang bersumber dari PNBP. Revisi ini menyebabkan perubahan pada Hal. III DIPA BSN.

- Revisi 5 disetujui tanggal 02 Desember 2019
  Revisi ini merupakan revisi ke 5 untuk penambahan/*Topup* Pagu Penggunaan PNBP Layanan Informasi (Biro HKLI) BSN TA 2019 & Optimalisasi untuk Penyelesaian Minus Pagu Anggaran Tunjangan Kinerja & Uang Makan TA 2019. Revisi ini dikarenakan adanya kelebihan target penerimaan yang direncanakan, perubahan pagu anggaran PNBP, perubahan jenis belanja antar keluaran dalam satu kegiatan dan perubahan pagu belanja pegawai. Penerimaan PNBP untuk keseluruhan BSN sudah melebihi target, sehingga penggunaan pagu BSN sebesar 88% dari penerimaan harus direvisi yang berakibat pada penambahan pagu BSN dari pagu sebesar Rp 237.610.843.000 menjadi pagu sebesar Rp 237.863.567.000. Secara keseluruhan, penambahan pagu tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan layanan yang bersumber dari PNBP. Revisi pagu anggaran belanja pegawai ini terjadi karena adanya penambahan CPNS di tahun 2019 sehingga anggaran yang ada kurang

untuk pembayaran Tunjangan kinerja dan uang makan. Revisi menyebabkan perubahan pada Hal.III DIPA BSN.

- Revisi 6 disetujui tanggal 18 Desember 2019
  Revisi ini untuk menyelesaikan Pagu Minus Belanja Pegawai (Gaji Pokok & Tunjangan yang Melekat didalamnya) TA 2019. Revisi menyebabkan perubahan pada Hal.III DIPA BSN.

6. Jumlah Draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR

Sesuai peraturan perundangan, bahwa Penyusunan Rancangan UU APBN dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR. Pembahasan RUU APBN tersebut dilakukan Kementerian/Lembaga dengan komisi terkait. BSN melakukan pembahasan anggaran terkait program, kegiatan dan anggaran bersama dengan Komisi VI DPR-RI selaku Komisi yang membawahi bidang ekonomi. Bagian Perencanaan sesuai dengan tugasnya menyiapkan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyusunan anggaran BSN. Pada tahun 2019, BSN melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR sebanyak 6 kali.

Dalam penyusunan draft bahan RDP, terkendala akan jadwal atau undangan yang diterima BSN dari Komisi VI DPR. Pembahasan dijadwalkan secara mendadak yang membuat terbatasnya waktu untuk menyiapkan dan pembahasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI tersebut. Untuk itu, selama ini dalam penyusunan draft bahan RDP tersebut dilakukan dengan koordinasi melalui media elektronik. RDP dengan DPR membahas mengenai program, kegiatan dan anggaran yang ada, baik realisasi tahun 2018, perubahan anggaran tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020.

Tabel III.5
Pelaksanaan RDP dengan Komisi VI DPR RI Tahun 2019

No.	Tgl Pelaksanaan	Keterangan
1	18 Juni 2019	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2020
2	18 Juli 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018
3	02 September 2019	Konsinyering RDP dalam rangka Pembahasan RKA-K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI TA. 2020
4	12 September 2019	Penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran
5	26 September 2019	Foto Bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI bersama Pimpinan K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI
6	04 Desember 2019	1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2. Masukan dari Mitra kerja terhadap program kerja dan anggaran K/L TA. 2020 3. Target penyelesaian *Road map* K/L

SASARAN 3	Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
7. Jumlah draft Laporan Kinerja	Laporan	1	1	1	3	3	3	100%	5	100%
8. Jumlah draft Laporan Tahunan	Laporan	1	1	1	1	1	1	100%	20	100%
9. Jumlah draft Laporan Monev	Laporan	12	12	12	12	12	12	100%	12	100%
Rata-rata capaian Sasaran								**100%**		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (1) jumlah draft laporan kinerja; (2) jumlah draft laporan tahunan; dan (3) jumlah draft laporan monev. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut seluruhnya tercapai 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

7. Jumlah Draft Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban BSN atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan upaya berbaikan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran BSN, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

Gambar III.11
Laporan Kinerja BSN Tahun 2018

Tahun 2019 BSN menyusun Laporan Kinerja berdasarkan lembaga Unit kerja Eselon I, II dan III yang sudah berdasarkan organisasi BSN yang baru. Seluruh laporan kinerja tersebut diupload pada website bsn sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik.

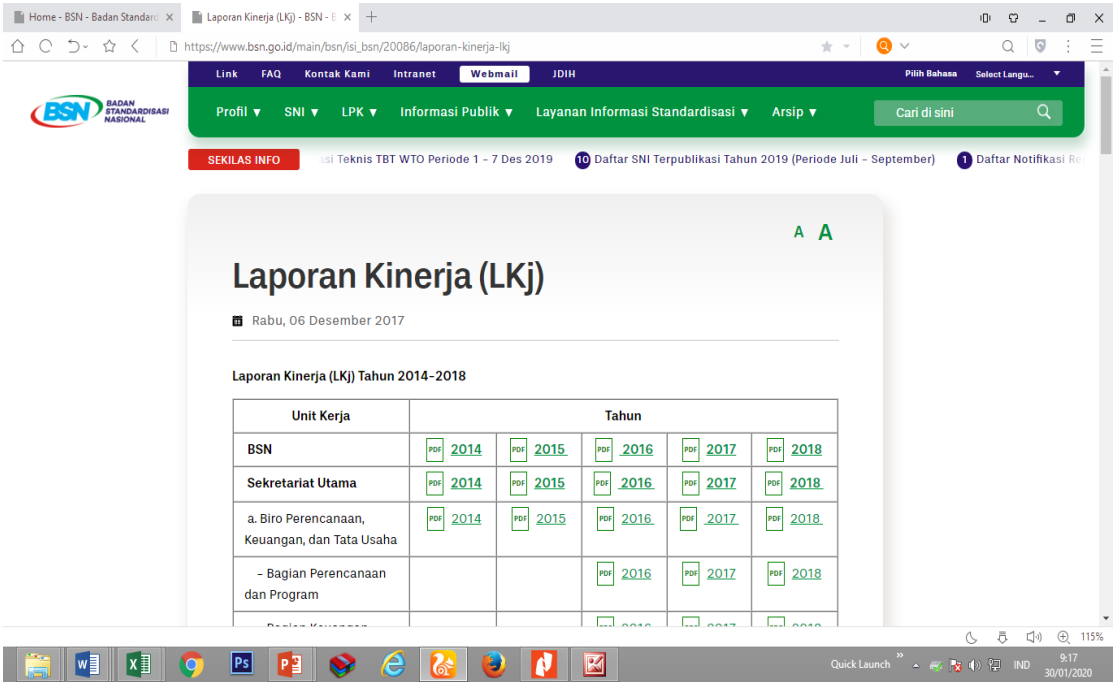

Gambar III.12
Akses dokumen Laporan Kinerja pada website BSN

8. Jumlah Draft Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan yang menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian suatu perusahaan dalam satu tahun. **Laporan Tahunan** berisikan tentang aktivitas dan kinerja Badan Standardisasi Nasional yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Gambar III.13

Laporan Tahunan BSN Tahun 2018

Dalam laporan tahunan BSN 2019 disajikan tentang Capaian Penting selama kurun wkatu 2014 – 2018, Peristiwa Penting, Kinerja dalam Statistik serta kegiatan sosial yang dilaksanakan BSN selama Tahun 2019

9. Jumlah Draft Laporan Monev

Pelaksanaan Pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan BSN selaras dengan yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan No.214 Tahun 2017 tentang Pengukuran Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, hal ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi hasil capaian realisasi kinerja dan anggaran kegiatan di setiap unit kerja. Dimana mekanisme pelaporanya menggunakan instrumen aplikasi yaitu aplikasi e-Monev Gen.3 Bappenas dan SMART Monev dari Direktorat Jenderal Anggaran kementerian

keuangan. Metode pelaporan yang digunakan pada aplikasi tersebut tidak jauh berbeda, dimana metode pelaporanya ialah melaporkan hasil realisasi capiaan kinerja dan anggaran mulai dari Output, Komponen, Indikator Output dan Kegiatan secara berkala setiap bulanya dengan cara mengisi capaian realisasi volume output dan anggaranya beserta analisis tahapan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta tindak lanjutnya. Pada periode triwulanan dilakukan verifikasi dan mendapatkan reviu dari Bappenas yang hasil penilaianya akan disampaikan ke pejabat pratama di BSN, maupun juga pada aplikasi SMART untuk setiap semesternya diharuskan membuat analisis tahun berjalan dan evaluasi akhir tahun sebagai salah satu poin dalam aspek implementasi dan manfaat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PMK 214 tahun 2017.

Di tahun 2019 Bagian Perencanaan berusaha untuk mempermudah pelaporan kinerja dan anggaran dan membuat sistem pelaporan monitoring yang lebih sederhana dan integrasi dengan single entry antar lembaga terkait. Hal itu berusaha diwujudkan dalam aplikasi *e-Performance*, dimana pelaporan bulanan dan triwulanan secara berkala dapat dilaporkan dalam satu aplikasi saja yang sudah terhubung antar instansi, sehingga tidak terjadi double input dan data dalam pelaporan baik bulanan maupun triwulanan, analisis yang lebih presisi serta real time dan teringtegrasi ke sistem IT Bappenas dan Kementerian Keuangan. Keuntungan dari penggunaan aplikasi e-performance dalam segi monitoring dan evaluasi adalah unit kerja dapat melakukan analisis dan lebih banyak waktu untuk dapat evaluasi kegiatanya setiap periode tanpa harus menginput lebih banyak data.

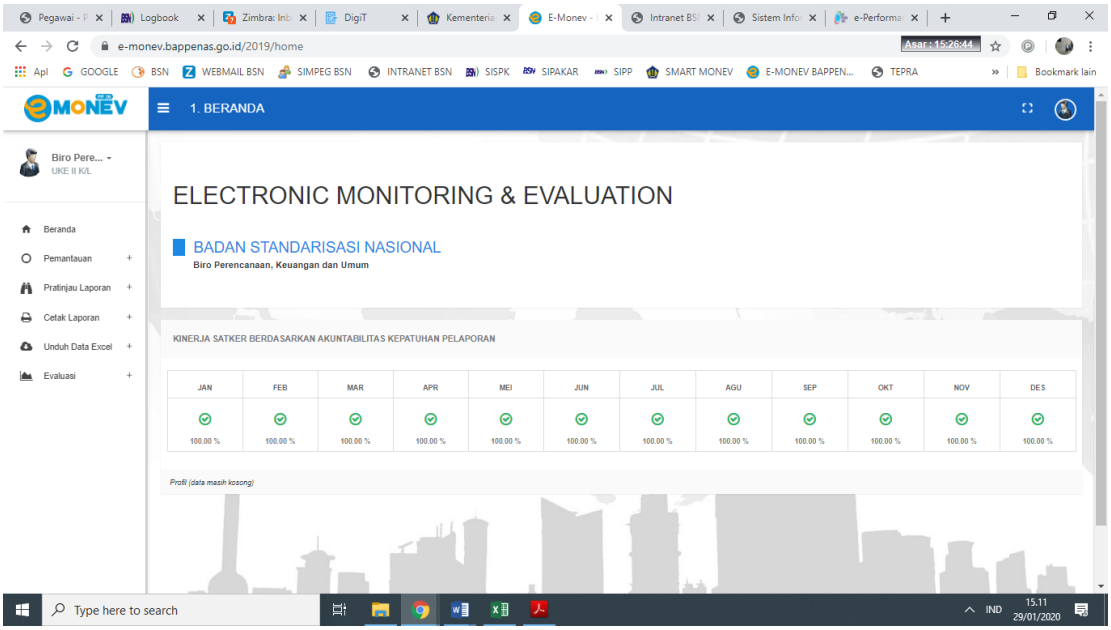

Gambar III.14
Screenshot Aplikasi e-Monev Bappenas Gen.3

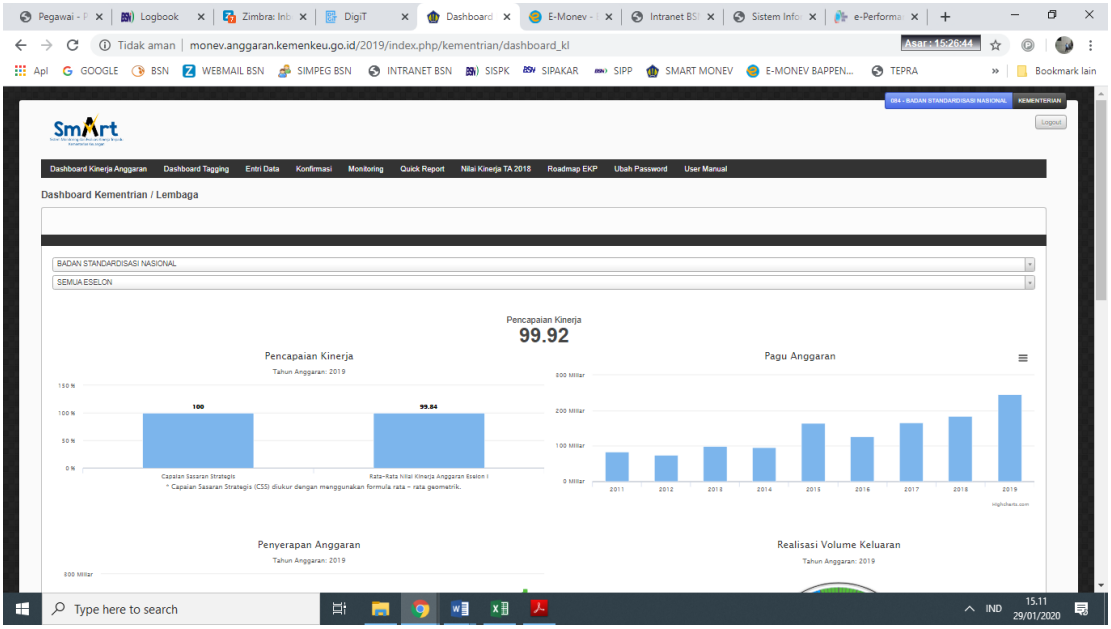

Gambar III.15
Screenshot Aplikasi Smart Monev DJA

Gambar III.16
Screenshot Aplikasi e-Performance BSN

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum pada awal tahun adalah sebesar Rp 2.800.000.000 dan sampai dengan akhir tahun pagu Bagian Perencanaan adalah sebesar Rp 2.700.000.000. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.700.000.000 sampai dengan 31 Desember 2019 realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2.699.489.726 atau 99.9%.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Perencanaan TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.7
Pagu dan Realisasi Anggaran - Bagian Perencanaan TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
3550	**Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum**	**116.149.128**	**113.060.796**	
3550.952	**Layanan Perencanaan**	**2.700.000**	**2.699.489**	**99.9%**
001	***Dokumen Perencanaan***	**2.594.727**	**2.594.320**	**99.9%**
051	Penyusunan Rencana Kerja	1.369.245	1.369.027	99.9%
052	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	325.149	325.050	99.9%
053	Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi	812.552	812.539	99.9%
055	Penyusunan Laporan Tahunan	87.781	87.703	99.9%
002	***Dokumen RKA-K/L***	**96.273**	**96.169**	**99.9%**
051	Penyusunan RKA-K/L	96.273	96.169	99.9%
002	***Dokumen Laporan Kinerja***	**9.000**	**9.000**	**100%**
051	Penyusunan Laporan Kinerja	9.000	9.000	100%
	Jumlah	**2.700.000**	**2.699.489**	**99.9%**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Perencaan Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Perencanaan Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah tercapai sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja dengan capaian sebesar 96,3%. Yang tidak tercapai hanya indikator jumlah draft Revisi Anggaran Eksternal.

Pelaksanaan kegiatan di Bagian Perencanan – Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum sangat mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi lingkup Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, sesuai tugas fungsi Biro PKU sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional. Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Bagian Perencanaan - Biro PKU di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN PERENCANAAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dessy Fitrica Sylviani
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Beni Nugraha
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 April 2019

Pihak Kedua

M. Beni Nugraha

Pihak Pertama

Dessy Fitrica Sylviani

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN PERENCANAAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah draft Renja	1	Dokumen
		2	Jumlah draft Perjanjian Kinerja	1	Dokumen
		3	Jumlah draft reviu Renstra/IKU	1	Dokumen
2	Terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan akuntabel	4	Jumlah draft RKAKL	2	Dokumen
		5	Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4	Dokumen
		6	Jumlah draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR	1	Dokumen
3	Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel	7	Jumlah draft Laporan Kinerja	3	Laporan
		8	Jumlah draft Laporan Tahunan	1	Laporan
		9	Jumlah draft Laporan Monev	12	Laporan

Jakarta, 30 April 2019

Pihak Kedua

M. Beni Nugraha

Pihak Pertama

Dessy Fitrica Sylviani

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN PERENCANAAN BIRO PKU
GEDUNG MENARA THAMRIN LT. 6
JL. M.H. THAMRIN KAV. 3
JAKARTA